

PEMBUDAYAAN KEADILAN JENDER

Oleh Mutiara Andalas, SJ, SS, STD

Membaca surat kabar, saya menemukan kasus-kasus memilukan penggagahan terhadap perempuan dan kelompok-kelompok marjinal lain. Meskipun data-data yang beredar di media massa ibarat puncak gunung es, maraknya kasus membantu saya melihat kerentanan, ancaman terhadap kemanusiaan perempuan. Melampaui kasus-kasus yang pelakunya lebih individual dan kriminalitas biasa, saya samar-samar menangkap kasus-kasus ini berakar pada ketidakadilan jender. Lamat-lamat saya juga melihat bahwa ketidakadilan jender telah membudaya dalam lembaga masyarakat, bahkan institusi agama. Ketidakadilan yang merusak tubuh korban, bahkan mengambil paksa kehidupan korban seringkali justifikasinya teologis.

Selain kisah-kisah memilukan ketidakadilan terhadap perempuan, saya penuh pengharapan menyaksikan semakin bertumbuhnya gerakan-gerakan perempuan dan profeminis dalam kampanye keadilan jender. Simpul-simpul gerakan budaya adil jender yang awalnya berpusat di lokasi-lokasi setempat dan menangani isu-isu lokal secara mandiri sekarang melihat kebutuhan untuk membangun jejaring. Menyadari kekuatan gerombolan antikeadilan jender yang berusaha memonopoli ruang hidup bersama, bahkan agama, mereka melihat kebutuhan untuk terlibat untuk mengorganisasi kembali ruang hidup tersebut melalui pembudayaan keadilan jender.

Tulisan pendek ini berikhtiar mendorong pembudayaan keadilan jender di Indonesia. Agar gagasan keadilan jender mengakar ke segala lapisan masyarakat dan masyarakat lebih adil jender, pembudayaan perlu langkah yang lebih sistematis. Di lapangan, pembudayaan keadilan jender seringkali berbenturan dengan gerombolan antibudaya keadilan jender. Meminjam istilah Driyarkara, pendiri Sanata Dharma, gerakan 'pembudayaan' seringkali bertarung dengan gerakan 'pembudayaan'. Karena antibudaya keadilan jender atau 'pembudayaan' seringkali lebih terselubung pergerakannya dan menyusup sampai lapis dalam bangunan sosial, malahan agama, saya merasa perlu untuk membicarakannya.

Bahaya Penghancuran Peradaban

Gagasan ‘pembudayaan’ perlu pengayaan akademik. Pierre Bourdieu awas terhadap bahaya kehancuran, penghancuran peradaban. Rezim teknokrasi menggiring masyarakat untuk menyetujui pemikirannya bahkan kalau mungkin tanpa diskusi terlebih dahulu dengan masyarakat. Bourdieu berikhtiar agar krisis yang berlangsung sekarang hendaknya menjadi kesempatan bersejarah. Para pengkaji akademik, penulis, seniman-seniwati, dan sebagainya dapat terlibat melepaskan masyarakat dari ortodoksi teknokratis (*technocratic orthodoxy*). Selain terhadap rezim teknokratik, ia juga mewanti-wanti agar gerakan sosial jangan terperosok menjadi sebetulnya ‘populism’ yang aksinya rentan berujung pada amuk kekerasan.¹

Keadilan jender masih memerlukan pengayaan konseptual supaya pemahaman tentangnya semakin holistik. Pada saat bersamaan, keadilan jender memiliki kemendesakan untuk pembudayaannya. Pembudayaan keadilan jender bertujuan untuk mendorong keadilan jender dalam masyarakat. Lebih lanjut, harapannya pembudayaan ini menggeser paradigma budaya ketidakadilan jender yang mengekal dalam masyarakat. Pengarusutamaan keadilan jender perlu mendapatkan tekanan karena kita seringkali membicarakan “keadilan” tanpa menyertakan subyek perempuan. Jauh dari mencukupi berbicara tentang keadilan semata. Penyertaan “jender” menjadikan pemahaman terhadap keadilan semakin penuh.

Pelebagaan Seksisme

Pada saat bersamaan, kita perlu menyadari gerakan-gerakan dalam masyarakat yang berusaha mempertahankan *status quo*, bahkan mengekalkan ketidakadilan jender. Berlawanan dengan gerakan pembudayaan keadilan jender, gerombolan antibudaya keadilan jender membela ideologi patriarki. Para feminis mencoba menamai gerombolan-gerombolan ini. Bell Hooks berbicara tentang ‘imperialisme patriarki’. Hooks berangkat dari pemahaman akan patriarki sebagai “seksisme yang melembaga” (*institutionalized sexism*). Sebagaimana ia menyaksikan penindasan terhadap perempuan Amerika kulit hitam, seksisme ini membentuk fondasi

¹ Pierre Bourdieu, “Against the Destruction of a Civilization” dalam *Acts of Resistance: Against the Myths of Our Time*, Terj. Richard Nice (Cambridge, UK: Polity Press, 2008), 24-28.

struktur masyarakat Amerika. Imperialism patriarki berusaha untuk “menjadikan penindasan terhadap perempuan sebuah keniscayaan budaya” (*cultural necessity*).²

Bell Hooks menekankan bahwa feminisme jauh dari sekedar

sebuah perjuangan untuk mengakhiri chauvinisme laki-laki atau sebuah gerakan kesetaraan antara perempuan dan laki-laki. Ia lebih merupakan komitmen untuk mengakhiri ideologi dominasi yang meresapi budaya Barat pada berbagai level – jenis kelamin, ras, dan kelas untuk menyebut beberapa – dan komitmen untuk mengorganisasi kembali masyarakat Amerika Serikat sehingga mengedepankan perkembangan diri dan menepikan imperialisme, ekspansi ekonomis, dan hasrat material.³

A. Nunuk P. Murniati menyadari kesulitan untuk memerangi imperialisme budaya. Alih-alih beroperasi sendirian, imperialisme budaya sering bersenggama dengan imperialisme teologis. Pranata masyarakat tentang relasi dalam kehidupan ini

cenderung semakin keras ketika situasi yang sosiologis dijadikan teologis. Orang dipaksa percaya bahwa budaya yang dibentuk manusia sebagai ciptaan Allah. Dalam situasi demikian, manusia tanpa iman yang kuat, akan sulit membedakan mana karya Allah, mana karya manusia. Manusia bisa keliru menyikapi mana kodrat Allah, mana buatan manusia melalui kebudayaan.⁴

Persoalannya, memilah secara *clara et distincta* faktor budaya ciptaan manusia dari faktor kodrati ciptaan Allah sulit. Persenggamaan antara imperialisme sosiologis dan teologis menjadikan ideologi patriarki memiliki kekuasaan yang hampir mutlak dalam menggagahi perempuan dan kaum marjinal lain.⁵ Nunuk Murniati menggarisbawahi baik kebutuhan maupun kemendesakan mengganti paradigma yang sudah terlalu lama terjebak dalam ketidaktahuan

² Bell Hooks, *Ain't I a Woman: Black Women and Feminism* (New York, NY: Routledge, 2015), 161.

³ Bell Hooks, *Ain't I a Woman: Black Women and Feminism*, 261.

⁴ A. Nunuk P. Murniati, “Prolog: Gerakan Budaya Menuju Keadilan dan Perdamaian” dalam *Getar Gender: Perempuan Indonesia dalam Perspektif Agama, Budaya, dan Keluarga*, Buku Kedua (Magelang, Jateng: Indonesia Tera, 2004), xx.

⁵ A. Nunuk P. Murniati, “Teologi Perempuan dan Ideologi Gender”, dalam *Getar Gender*, 10-11.

sebagai yang mengakibatkan ketidakadilan jender. Ia mengundang kita untuk mencermati bahwa budaya dan agama seringkali sudah mengidap bias jender. Penting 'gerakan budaya' untuk menuju masyarakat yang berkeadilan jender.⁶

Pembaharuan Komitmen

Gerakan membudayakan keadilan jender pada waktu-waktu belakangan ini lebih menantang karena melampaui pengarusutamaan isu dalam lembaga masyarakat, juga institusi agama. Pembudayaan keadilan jender dalam konteks Indonesia mencakup pembaruan komitmen melawan gerombolan antikeadilan jender yang membenamkan secara terselubung ideologi patriarki dalam struktur lembaga. Kampanye keadilan jender perlu berhadapan dengan pengerahan massa tandingan yang secara terbuka menggunakan cara-acara kekerasan demi meraih tujuannya. Ketika berhasil menyusup dalam struktur rezim, apalagi berkuasa sebagai rezim, mereka memiliki kekuasaan hampir tanpa batas untuk menggolkan agenda-agendanya.

Pembudayaan keadilan jender perlu memasuki ruang-ruang kehidupan bersama yang ideologi patriarki telah menjajahnya. Para pelibat keadilan jender perlu mengembalikan ruang-ruang kehidupan bersama sebagai yang memberikan perlindungan kepada kaum perempuan dan marjinal lain. Mereka perlu mengembalikan lembaga-lembaga kehidupan bersama sebagai yang memberikan kehidupan kepada para perempuan dan kelompok marjinal lain. Tragedi kemanusiaan terjadi ketika negara, apalagi agama, justru menjadi lokasi penggagahan kemanusiaan perempuan. Pelibat keadilan jender perlu berkomitmen untuk mengembalikan ruang-ruang itu sebagai yang memartabatkan perempuan kembali.

⁶ A. Nunuk P. Murniati, "Prolog: Gerakan Budaya Menuju Keadilan dan Perdamaian" dalam *Getar Gender*, xxvi.